

**EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PENEGAKKAN HUKUM  
DI INDONESIA DI TINJAU DARI ASPEK  
HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh :

**AHMAD SYAHRUN**  
**10300109002**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Desember 2013 M

Penyusun,

**AHMAD SYAHRUN**  
**NIM. 10300109002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi **Ahmad Syahrin, Nim: 10300109002** mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, 18 November 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Usman Djafar, M. Ag**  
**Nip :19580901 1991021 001**

**Drs. Dudung Abdullah, M. A g**  
**Nip : 19540203 198503 1 002**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)**” yang disusun oleh saudara **Ahmad Syahrudin Nim. 10300109002** mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari Selasa Tanggal 2013 bertepatan dengan Tanggal 1434 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 28 Januari 2014 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (.....)

Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M. Si. (.....)

Munaqisyi I : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag (.....)

Munaqisyi II : DR. Kurniati, M. Hi (.....)

Pembimbing I : Prof. DR. Usman Djafar, M.Ag (.....)

Pembimbing II: Drs. Dudung Abdullah, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.**  
Nip. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi strata satu (S1) pada fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia.

Keberadaan karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis (Ayahanda H. Mustafa Ibrahim dan Ibunda Hj. Samiah), atas segala jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta membiayai studi penulis serta memberi dorongan dan do'a restunya, sehingga penulis dapat melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
2. Kakak penulis yang penulis hormati DR. Mustari Mustafa dan Diani Marganingsih beserta keluarga yang selama saya menempuh kuliah di makassar

tiada henti-hentinya selalu memberikan nasehat dan dukungan yang sangat berarti buat penulis.

3. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dra. Nila Sastrawati, M.Si, selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan beserta Alimuddin, S.Ag, M. Ag. selaku sekretaris jurusan, serta Prof. DR. Usman Djafar, M.Ag Selaku pembimbing I dan Drs. Dudung Abdullah, M.Ag Selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
6. Rekan-rekan HMI Kom. Syari'ah dan Hukum, rekan-rekan seperjuangan penulis HPK 2009 (Erdha, Iswan, Bahar, Yudhi, Hamzah, Anwar, Regar, Lili, Aldi, dll), rekan-rekan IKM-MAGRIB Makassar, yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan yang lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.

Makassar, 25 Desember 2013 M.

Penyusun,

**Ahmad Syahrudin**

**NIM: 10300109002**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Studi Kepustakaan .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
G. Garis Besar Isi Skripsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI</b>	
A. Konsep Dasar dan Sejarah Pidana Mati .....	17
1. Hukuman Mati di Mancanegara .....	17
a. Abad Pertengahan dan Zaman Permulaan Baru .....	18
b. Zaman Modern Hingga Abad Ke-20 .....	19
2. Hukuman Mati di Indonesia .....	21
a. Hukuman Mati Zaman Dulu .....	22
b. Hukuman Mati Saat Ini .....	25
B. Beberapa Metode Eksekusi Mati.....	27
C. Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Pidana Mati.....	29
1. Teori Absolut (Teori Pembalasan) .....	30
2. Teori Relatif (Teori Tujuan) .....	34
3. Teori Gabungan .....	37



### **BAB III KONSEP PIDANA MATI DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

A. Pengertian Pidana Mati.....	39
B. Pemidanaan Dalam Konteks Undang-Undang .....	40
C. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia .....	44
1. Menurut KUHP .....	45
2. Di luar KUHP .....	47
3. Dalam RKHUP Nasional.....	50
D. Pandangan Tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Alasan Hukumnya.....	50

### **BAB IV PIDANA MATI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	60
B. Pidana Mati Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) .....	74
1. Pihak-Pihak Yang Kontra Terhadap Pidana Mati .....	78
2. Pihak-Pihak Yang Pro Terhadap Pidana Mati.....	85
C. Pidana Mati Dalam Konsep Hukum Islam .....	90

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	97
B. Implikasi Penelitian .....	98

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:



b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	w	:	و
dz	:	ذ	'	:	ع	h	:	ه
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (**a**), (**i**) dan (**u**) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
Fathah	a	â
Kasrah	i	î
Dammah	u	û

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (**ay**) dan (**aw**), misalnya: *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

1. *Syhadah* dilambangkan dengan konsonan ganda.
2. Kata sandang **al-** (*alif lam ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (**Al-**) Contohnya: **Al-Khitâb**.
3. Ta' marbuttha (ة) ditransliterasikan dengan **t**. Tetapi jika ia terletak di akhir huruf **h**. Contohnya: *Fatimah*
4. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an*, *sunnah* dan *khusus*.

5. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya: **أهل البيت** (*Ahl Al-Bayt*).

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- |    |              |                                |
|----|--------------|--------------------------------|
| 1. | Swt. =       | Subhânahû wata'âlâ             |
| 2. | Saw. =       | Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam |
| 3. | A.s. =       | 'Alayhi Al-Salâm               |
| 4. | H. =         | Hijriah                        |
| 5. | M. =         | Masehi                         |
| 6. | S. M. =      | Sebelum Masehi                 |
| 7. | W. =         | Wafat                          |
| 8. | Q.S...(....) | = Quran, Surah....., ayat..... |

## ABSTRAK

**NAMA : AHMAD SYAHRUN**  
**N I M : 10300109002**  
**FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM**  
**JURUSAN : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN**  
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM**  
**PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA DI**  
**TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**  
**(HAM).**

---

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang eksistensi pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga pidana mati jika dipandang dari prespektif hukum Islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yang bersifat deksriptif yaitu menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data pustaka dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang kemudian menunjukkan bahwa penerapan atau penegakkan hukuman pidana mati di Indonesia masih perlu dipertahankan dari hukum pidana pokok KUHP. Ini dikarenakan oleh masih banyaknya kasus-kasus yang sudah dijatuhi pidana penjara dan pidana lain itu kemudian belum bisa membuat seorang terpidana jera. Pidana mati juga akan menimbulkan tekanan moral kepada orang-orang yang mungkin saja akan merencanakan atau ingin melakukan tindak pidana. Dalam hukum Islam juga sudah jelas landasannya bahwa pidana mati ini merupakan sanksi pokok. Ini terdapat dalam surat Al-baqarah (ayat 178-179), surat Al-maidah (ayat 32), surat Al-an'am (ayat 151), dan Al-isra' (ayat 33).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis.

Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah di

kenal.<sup>1</sup> Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan diperkenalkan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (*paal*), di matikan dengan menggunakan keris (*kerissen*), dicap bakar (*brandmerken*), dipukul (*geeselen*), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (*confinement*) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari'at Islam dengan dekret Allah SWT. yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat- syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur- unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu adanya hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Q. S Al-Baqarah 2:

---

<sup>1</sup>S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), hal. 51.

<sup>2</sup>E. Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, (Surabaya, 1986), hal. 19.

178) dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia (Q. S Al-Baqarah 2: 179).

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>3</sup>

Pernyataan yang belum dijawab ialah mengenai tujuan penjatuhan pidana, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang berpendapat bahwa jika memang hanya untuk memperbaiki si penjahat, tentu tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup.

Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih

---

<sup>3</sup>Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Rachmat Djatniko et. al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 16- 17.



akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?<sup>4</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Di antaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.<sup>5</sup> Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang di ancam hukuman

---

<sup>4</sup>Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 7.

<sup>5</sup>Prof. Moeljatno, SH, *Kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

<sup>6</sup>UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia.

mati di Indonesia justru semakin banyak.<sup>7</sup> Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak presiden.<sup>8</sup>

Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) *International Comvenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Kapupespenkum Kejagung, Kemas Yahya Rahman, 28 pelaksanaan eksekusi mati sudah melalui prosedur resmi. Mekanisme eksekusi terhadap Ayodha- terpidana mati kasus narkoba dari India sudah benar. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikat Ayodha di pohon, menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menembaknya. Sementara, menurut Koesparmono Irsan (GRANAT),<sup>9</sup> hukuman mati merupakan pilihan orang yang bersangkutan. Sebab peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>7</sup>A. Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm. 326.

<sup>8</sup>Melalui Keppres No. 20/G. 21/ G.22/ G. 23/ G dan No. 24/ G Tahun 2003.

<sup>9</sup>Wawancara Televisi, Tv One, 20 Agustus 2004.

Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam efek jera.<sup>10</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah dilaksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>11</sup> Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehndak zaman. Meski demikian saat ini belum di temukan alternatif lain sebagai penggantinya.<sup>12</sup> Hukuman mati yang di kembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM.

Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana.

---

<sup>10</sup>Anung Razaini, *Problematika Pidana Mati di Indonesia*, www. HMibecak. Word. Press. Com

<sup>11</sup>Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru (Jakarta, 1978), hlm. 14-15.

<sup>12</sup>Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan.

Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".<sup>13</sup> Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan "*Hukum Kodrat*" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hak hidup sebagai sebuah isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman mati. Beberapa persepektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang manusia. Namun

---

<sup>13</sup>Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

demikian, tidak sedikit pula orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan.

Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria<sup>14</sup> yang mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang dan sangat terkait dengan gagasan HAM. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.<sup>15</sup> Namun demikian, di beberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi

<sup>14</sup> <http://appeturuk.blogspot.com/2013/04/cesare-beccaria.html>

<sup>15</sup> Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hal. 121-122.

anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati.

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama beertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka dari itu penulis mencoba mengkaji dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Eksistensi Pidana Mati dalam Pengakkan Hukum di Indonesia di tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan hadirnya berbagai masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimanakah eksistensi pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dari permasalahan tersebut dapat di analisis secara teoritis kedalam beberapa sub masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM)?

3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia?

### ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian yang menjadi variabel dalam penulisan ini.

- Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>16</sup>
- Hukum pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang di jatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman yang terberat yang di jatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>17</sup>
- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam diri pribadi individu dan diakui secara konstitusional.<sup>18</sup>
- Dari beberapa defenisi operasional yang saya kemukakan diatas dapat di rangkumkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Alasan yang paling mendasar adalah karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan pidana mati ini juga dianggap sebagai hukuman yang paling ekstirm, sehingga beberapa kalangan menilai bahwa hukuman ini di hapus sebagai pidana pokok.

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta, 2005), hal. 410.

<sup>17</sup>Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>18</sup>Hafid Abbas, "Pengantar" dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*(Jakarta: Kencana. 2012), h. xii.

#### ***D. Studi Kepustakaan***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum*. Dalam buku ini di jelaskan tentang wacana penghapusan hukuman mati dan eksistensi keberadaan hukuman mati dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam sebuah buku yang di tulis oleh Yon Artiono Arba'i dengan judul buku *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Penjelasan dalam buku ini adalah tentang sejarah munculnya hukuman mati di tinjau dari sejarah pembedaan, mulai dari sejarah hukuman mati di Mancanegara sampai di Indonesia, beberapa metode eksekusi mati dan pandangan agama tentang adanya hukuman mati itu sendiri.

Sumber referensi berikut yang menjadi tambahan pembahasan penulis adalah buku yang di tulis oleh Yahya Ahmad Zein, S. H, M. H, dengan judul buku *Problematika Hak Asasi Manusia*. Dalam buku di jelaskan problematika penerapan pidana mati dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang di mana pidana mati di anggap suatu hukuman yang sangat ekstrim yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok yaitu hak hidup. Maka dari itu ini merupakan pertentangan yang menarik di kaji lebih jauh dalam buku ini.

Yang berikut yaitu *Menguak Realitas Hukum*, buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S. H, M. H, mencoba menjelaskan masih perlunya pidana mati diterapkan sebagai hukum nasional. Hal ini di lihat dari beberapa faktor kejahatan



yang kemudian penulis mengemukakan pendapat singkat bahwasannya pidana mati masih menjadi hukuman yang patut di pertahankan.

Sumber yang berikut adalah buku tentang *Hukum Pidana Indonesia*, membahas tentang teori pembedaan dan juga membahas tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Buku ini ditulis oleh Erdianto Effendi, S.H., M. Hum.

Nanang M. Hidayatullah, dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional Indonesia*, disini penulis mengkaji tinjauan historis kedudukan hukum islam di Indonesia dan juga membahas tentang sistem hukum di Indonesia.

*Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, buku ini ditulis oleh Ramdlon Naning, S. H. Buku ini membahas tentang hakekat, sejarah, perkembangan, dan macam-macam hak asasi manusia.

Dari beberapa literatur diatas baik secara perorangan maupun secara keseluruhan belum ada yang membahas mengenai Hukum Pidana Mati di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun ada, tetapi kebanyakan membahas secara umum bukan secara khusus atau mendalam. Keterbatasan literatur tersebut yang menjadi landasan bagi penulis untuk membahas perpektif HAM terhadap Hukum Pidana Mati itu sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>19</sup>

## **2. Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) melalui studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa metode deduktif yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>19</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 10.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Islam terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan Hukuman Pidana Mati dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Dapat memberikan informasi tentang perspektif HAM terhadap eksistensi hukuman mati, baik kepada Mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum.

- 3) Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, setelah adanya regulasi, bukan hanya sekedar wacana saja.



## **KOMPOSISI BAB**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan dan Batasan Masalah
- C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
- D. Studi Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI**

- A. Konsep Dasar dan Sejarah Pidana Mati
- B. Beberapa Metode Eksekusi Mati
- C. Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Pidana Mati

### **BAB III KONSEP PIDANA MATI DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

- A. Pengertian Pidana Mati
- B. Pemidanaan Dalam Konteks Undang-Undang
- C. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia
- D. Pandangan Tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Alasan Hukumnya

### **BAB IV PIDANA MATI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM ISLAM**

- A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- B. Pidana Mati Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)
- C. Pidana Mati Dalam Prespektif Hukum Islam

### **BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi Penelitian

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI

#### A. Sejarah Pidana Mati

Ditinjau dari sejarah pembedaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retaliasi- hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak- penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala.<sup>1</sup> Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).

Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang di lakukan oleh Cina. Pada umumnya negara- negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, masih mempertahankannya.<sup>2</sup>

##### a. Hukuman Mati di Mancanegara

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertua yang pernah dilaksanakan pengadilan. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 9.

<sup>2</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 9.

mati sebagai hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil dari pada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Argumen inilah yang dianut banyak negara bagian di Amerika Serikat. Beberapa data perbandingan menunjukkan jumlah kejahatan berat yang dapat diancam hukuman mati lebih sedikit di negara bagian yang melaksanakan hukuman mati dari pada yang melarang hukuman mati.<sup>3</sup>

### **1) Abad Pertengahan dan Permulaan Zaman Baru**

Pelaksanaan hukuman mati berbeda di tiap masyarakat. Cara umum dilakukan pada abad pertengahan, misalnya, memasukkan terhukum dalam minyak mendidih, menggilasnya dengan roda, memasukkannya dalam peti besi, menenggelamkannya, maupun menusuknya dengan tombak. Di Swiss, sampai sekitar tahun 1400, hukuman mati dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak masih dilakukan. Kemudian, tahun 1600 para terpidana mati ditenggelamkan. Di Inggris hukuman mati juga sering dijatuhkan dalam kasus pelanggaran agama. Kemudian, pada 1814, tiga anak laki-laki yang berusia sekitar 8-11 tahun dijatuhi hukuman mati hanya karena melakukan pelanggaran hak milik yaitu mencuri sepasang sepatu. Masih di Inggris, menurut Marvin Hume Bovee dalam bukunya, *Reasons for Abolishing Capital Punishment* (1873), 72.000 tindak pidana pencurian kecil dan berat

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

dihukum mati pada zaman Henry VIII. Bahkan, pada 1533 Henry VIII menghukum mati 37 warga Protestan hanya karena tidak mau mengakuinya sebagai pemimpin gereja.

Pada 1497, sebanyak 18 orang Yahudi dibakar sampai mati di Bukit Yahudi karena membunuh 4 anak pemeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 hukuman mati dilaksanakan dengan cara menggantung terhukum dan membiarkan mayatnya tetap tergantung, terkadang juga mencelupkannya ke dalam ter, sebagai peringatan kepada mereka yang berbuat jahat. Menyembelih, mengeluarkan isi perut, memenggal kepala, dan merobek tubuh menjadi empat bagian juga merupakan cara eksekusi hukuman mati yang digunakan pada abad lampau. Sementara terhukum kasus-kasus terpidana pemerkosaan, penyerangan, perbuatan cabul dan asusila, perzinahan, serta inses umumnya dikirim ke tiang gantung dan dieksekusi dimuka umum. Pencuri-pencuri wanita atau pencuri barang/ uang yang nilainya lebih dari satu guldenpun dikirim ke tiang gantung, meskipun permohonan untuk diganti dengan tusukan pedang diperbolehkan untuk mengurangi rasa malu.

## **2) Zaman Modern Hingga Abad Ke-20**

Sejak 1888 pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925 cara ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut. Menurut data tahun 1985, dari 42 terpidana mati 24 dilakukan dengan listrik, 11 dengan kamar gas, 6 digantung, dan 1 ditembak. Pemerintah Federal mengizinkan pelaksanaan hukuman mati dilakukan sesuai dengan cara-cara yang dianut oleh



negara bagian tempat hukuman mati diputuskan. Saat ini hukuman mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat dan tanpa kesulitan. Pelaksanaan hukuman matipun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi. Hukuman mati di Cina dilakukan dengan menembak terpidana. Hukuman mati tersebut tidak dilaksanakan bagi mereka yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan atau pada wanita hamil pada saat putusan hakim. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kasus berat, terpidana yang telah mencapai usia 16 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dipidana mati dengan penundaan eksekusi selama dua tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 44 dan pasal 45 *The Criminal Law of China*.<sup>4</sup>

Perkembangan hukuman mati diberbagai negara sangat tergantung pada politik hukum dan politik kriminal di negara yang bersangkutan. Menurut Barda Nawawi,<sup>5</sup> dalam kebijakan legislatif selama ini, tidak ada satu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah kejahatan atau delik politik bukan istilah yuridis, melainkan istilah sosiologis. Di kalangan publik dan ilmiah pun masih belum ditemukan kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik dan apa yang menjadi ruang lingkupnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa lembaga internasional, seperti Amnesty Internasional, 136 negara masih menerapkan hukuman mati, meskipun sebagian besar negara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak lagi menjatuhkan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 176-177.

hukuman mati. Sementara itu, 50 negara menghapus hukuman mati dari undang-undang yang berlaku.<sup>6</sup>

#### **b. Hukuman Mati di Indonesia**

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.<sup>7</sup> Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid Kartanegara, yaitu:

1. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa kolonial, dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antar suku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.
2. Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparaturnya pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antar pulau yang juga tidak sempurna.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengkajian Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Ham, 2003), hlm. 4-5.

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 341.

3. Terlepas dari alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Sahetapy menyebut kebijakan itu sebagai tindakan diskriminasi karena pencantuman pidana mati hanya ada dalam WvS, sementara di Belanda tidak.<sup>9</sup>

### 1) Hukuman Mati Zaman Dulu

Zaman dulu hukum adat di beberapa daerah di Indonesia mengenal pidana mati dengan cara yang kejam. Misalnya di Aceh, seorang istri yang berzinah akan di bunuh. Pada zaman kesultanan, terdapat lima macam pidana utama, yaitu memotong tangan pencuri, membunuh dengan pentungan, menyalib, memotong bagian tubuh tertentu, dan menembak kepala dalam lesung.<sup>10</sup> Pada zaman Kerajaan Majapahit, hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Kerajaan-kerajaan menerapkan pidana mati dengan berbagai cara, seperti digantung, dipancung, ditikam dengan keris, dicekik, dan ditenggelamkan ke laut. Seseorang yang melanggar hukum adat pun dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati yang dilakukan secara diam-diam, yaitu dengan *black magic*.<sup>11</sup>

Di Sulawesi Selatan, pada masa pemerintahan Aru Palaka, orang yang membahayakan kekuasaan negara, seperti lasuni, dipancung. Kepalanya

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 344.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 2. Lihat juga Rudy Satriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 21-22. Lihat juga E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), hlm. 20.

<sup>11</sup> Werdono Soewardi, dkk., *Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sudarso dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Ekonomi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 20, sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam *Sistem Hukuman dan Pemidanaan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 14-15.

diletakkan diatas baki dan dihadapkan kepada Aru Palaka sebagai bukti eksekusi telah dilaksanakan.<sup>12</sup> Terpidana pemberontakan yang tidak mau pergi ke tempat pembuangannya pun boleh dibunuh oleh setiap orang yang menemukannya. Jadi, semua tersangka kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dipidana mati. Di Tana Toraja terpidana dihukum dengan cara dipenggal kepalanya.<sup>13</sup>

Di kalangan masyarakat Wajo di kenal dengan tradisi pelayaran dan perdagangan, terdapat pengecualian hukuman untuk nahkoda. Seorang nahkoda dapat bertindak sebagai tirani diatas perahunya, dan walaupun bersalah kepada raja ia tidak akan dipidana.<sup>14</sup> Menurut undang-undang Amanna Gappa, jika seorang merdeka membunuh raja di atas kapal, namun anak nahkoda yang mengadilinya tidak memberikan putusan pidana mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya menjatuhkan pidana denda, nahkoda tidak dapat dipidana karena keputusannya. Menurut Matthes, saksi kejadian hal tersebut merupakan pengecualian. Raja memang sangat berkuasa di daratan, apalagi di istana, namun tidak di lautan. Matthes juga pernah melihat raja Aru Padali dari Tempe menjatuhkan pidana mati dengan keris terhadap orang yang mencuri sarung raja. Mungkin hukuman dijatuhkan karena pencurian itu mempermalukan raja.

Menurut Latoa, terdapat 11 alasan seseorang dijatuhi hukuman mati,<sup>15</sup> yaitu:

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 14.

<sup>13</sup> Andi Hamzah dan Andi Swuangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 53.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

1. *Lejja Sutappere*: memasuki kamar tidur seorang wanita ketika suaminya sedang berpergian.
2. *Gegok Paso*: menggoyang tiang negara, berarti makar terhadap raja atau pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin adat.
3. *Poppo Gamaru*: mengacaukan rapat adat.
4. *Suloi Liang*: menerangi gua, berarti menunjukkan tempat persembunyian raja (berkhianat).
5. *Mappolo Lila*: mematahkan lidah, berarti dengan sengaja melanggar perintah-perintah raja.
6. Mukah dengan seorang ratu.
7. *Sapa Tanah*: mengotori tanah, berarti berbuat cabul.
8. *Lewu Sepe*: menutup jalan air, berarti merusak pendapat raja.
9. *Mapaiboko*: membelakangi, berarti menyalahgunakan nama raja untuk melakukan kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.
10. *Pelo Weloi Arajeng*: mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja.
11. *Makkai Resaliwengeng Arunge Anrenge Tanah Naonroie*: *makkai* berarti menggali; *resaliwengeng* berarti diluar arung raja; *anrenge* dan *tanah naonroie* berarti tanah tempat tinggalnya. Artinya bekerja sama dengan musuh diluar negeri terhadap raja dalam negeri (berkhianat).

Dalam masyarakat Batak, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah dan keluarga korban menyerahkannya untuk dipidana mati, maka pidana matipun segera dilaksanakan. Namun, denda atau ganti rugi tidak diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan terhadap negara atau orang-orang yang memerintah, demikian juga mukah dengan istri raja. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tersebut hanya hukuman mati.<sup>16</sup> Pidana mati juga dijatuhkan pada orang yang melanggar sistem perkawinan eksogami.

## **2) Hukuman Mati Saat Ini**

Ada dua peraturan yang mengatur pidana mati, yaitu pasal 11 KUHP yang mengatur penjatuhan hukuman mati dengan menggantung orang yang bersalah dan satu peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Jepang, yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembakan. Salah satu contoh pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang ialah tembak mati pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi pada 14 Februari 1945.

Dualisme ini berlangsung selama beberapa bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, semua peraturan Jepang di daerah-daerah yang diduduki Belanda dianggap tidak sah setelah pendudukannya berakhir. Di daerah-daerah itu berlaku peraturan baru yang sesuai dengan pidana mati dengan cara ditembak. Sebelum pengakuan kedaulatan, terjadi suatu perubahan tetap di daerah-daerah teritorial. Peraturan itu berlaku di wilayah Republik Indonesia dan daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah 27 Desember 1949, perubahan ini terus berlangsung selama masa pengembalian daerah-daerah

---

<sup>16</sup> A. L. Van Hassett, *Midden Soematra* (1882), hlm. 233, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 14.

Republik Indonesia, yang saat itu menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>17</sup>

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terwujud, hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Pada 29 September 1958 Badan Legislatif menetapkan UU No. 73 Tahun 1958 untuk mencapai kesatuan dalam menetapkan hukum pidana dengan mengumumkan UU No. 1 Tahun 1946 yang mengikat seluruh wilayah Indonesia. Namun, UU ini merupakan hukum pidana pada umumnya. Keduanya telah diundangkan dan hukum pidana di luar kode kriminal. Akibatnya, UU itu memiliki efek pada peraturan dari lembaran Negara 1945 No. 123 pasal 1 dari UU No. 1 Tahun 1946 yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan dari Stbl. 1945 No. 123. Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Stbl. 1945 No. 123 hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, bukan di seluruh Indonesia. Keberadaan dua peraturan mengenai cara pelaksanaan pidana mati yang berbeda, dalam praktiknya, dapat dengan mudah dikesampingkan. Stbl. No. 123 dapat dilaksanakan untuk pidana mati yang dijatuhkan semua pengadilan negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11 KUHP tidak menentukan daerah yang harus melaksanakan pidana mati. Tidak disebutkan juga bahwa pidana mati harus dilaksanakan di daerah hukum hakim yang memutuskan, begitu pula dengan pidana penjara yang dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia mana pun. Sementara itu, pidana mati oleh pemerintah selalu dilaksanakan di daerah Jakarta, sesuai Stbl.

---

<sup>17</sup> Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

1945 No. 123. Keadaan ini sudah tentu tidak dihentikan oleh UU No. 73 Tahun 1958.

Ada juga yang beberapa keberatan mengenai pelaksanaan pidana mati menurut ketentuan pasal 11 KUHP, yaitu, *pertama*, sulitnya menemukan algojo. Walaupun ada pasti tidak tahan menghadapi tekanan, baik dari diri sendiri maupun hinaan orang lain. *Kedua*, seseorang yang dihukum gantung kemungkinan mengalami di luar perikemanusiaan karena proses menuju kematian yang lama. *Ketiga*, hukum gantung menimbulkan trauma bagi orang-orang yang menyaksikan.

#### ***B. Beberapa Metode Eksekusi Mati***

Sejak pengakuan kedaulatan hingga saat ini pidana mati dilaksanakan berdasarkan hukum acara peradilan militer yang selalu dilakukan dengan cara ditembak. Peraturan baru tentang pelaksanaan pidana mati ialah Penpres Republik Indonesia Tahun 1964 No. 2, yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilaksanakan dengan tembak mati, pidana mati, jika tidak ada ketentuan lain dari Menteri Kehakiman, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sementara pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang di dalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 23-26.



Hingga kini terdapat beberapa metode pelaksanaan hukuman mati yang dianut beberapa negara, yaitu:

a. Dengan cara ditembak

Eksekusi mati ini banyak dilakukan di Indonesia dengan menggunakan senjata api yang dilaksanakan oleh satu regu tembak. Cara ini masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan hukuman mati lainnya. Perasaan anggota regu tembak pun tidak terlalu tertekan karena mereka melakukan eksekusi bersama-sama, dengan mata pidana yang tertutup rapat. Di samping itu, pidana mati dengan cara ditembak juga mempercepat kematian karena peluru langsung diarahkan ke jantung yang sudah di beri tanda untuk menjadi sasaran tembak.

b. Kursi Listrik

Kursi listrik yang digunakan untuk mengesekusi narapidana dialiri arus listrik antara 500 hingga 2000 volt per 30 detik. Arus tambahan bisa diberikan jika diperlukan. Biasanya, pada saat eksekusi dilakukan, asap akan keluar dari kaki dan kepala terpidana.

c. Kamar Gas

Seorang narapidana yang dieksekusi dengan kamar gas, diikat di kursi, yang di bawahnya telah diberi sebuah wadah berisi air penyulingan minuman keras. Di atas wadah itu digantung tas berjaring yang berisi setengah kilo pil sodium sianida. Pil tersebut akan berubah menjadi asam biru ketika dimasukkan ke air. Narapidana diinstruksikan untuk menghirup napas. Setelah ia menghirup asam biru tersebut, oksigen diotaknya akan terputus. Seketika itu juga tubuhnya akan mengejang. Beberapa menit kemudian ia akan kesulitan bernapas tanpa

kehilangan kesadarannya sama sekali. Matanya pun akan keluar, kulitnya akan berubah menjadi ungu dan narapidana mulai meracau. Setelah sepuluh menit barulah ia mati.

d. Suntik Mati

Eksekusi mati dengan suntikan dianggap lebih manusiawi, karena satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh narapidana. Namun eksekusi ini juga kadang-kadang gagal, terutama karena suntikan dilakukan oleh staf yang kurang berpengalaman. Faktor lain yang bisa mengagalkan eksekusi suntik ini adalah narapidana juga takut dengan suntikan karena dulunya mereka pecandu obat-obatan terlarang.

### ***C. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Pidana Mati***

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana mati. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pembedaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut perlu diketahui makna dan hakikat pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Aksara Persada, 1980), hlm. 9.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5.

Defenisi-defenisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana yang diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.<sup>22</sup> Dilihat dari tujuannya, teori pemidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

### **1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)**

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1964), hlm. 4.

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Cetakan ke-2, hlm. 80. Bandingkan juga dengan Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1980), hlm. 85-87.

atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.<sup>23</sup>

Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain pidana itu sendiri. Pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum. Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Karena itulah pidana dilepas dari tujuan.<sup>24</sup> Menurut teori absolut setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

Teori yang dianut Kant dan Hegel, sarjana dari Jerman ini hanya melihat ke masa lampau tanpa memperhatikan masa depan. Immanuel Kant mengatakan bahwa pembunuh harus digantung walaupun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut teori pembalasan ini, tujuan pidana mati adalah penghukuman itu sendiri.<sup>25</sup> Pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang

---

<sup>23</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

<sup>24</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984), hlm. 25.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dapat dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu.<sup>26</sup>

Selain Kant, Hegel juga memandang pidana mati sebagai suatu yang logis, konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan menurut Hegel adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita sosial. Pidana merupakan *Negation der Negation*.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah/ kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus).<sup>28</sup>

Menurut Sudarto, saat ini pengajaran pembalasan klasik pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka sudah tidak ada. Jika masih ada penganut teori pembalasan, mereka merupakan penganut teori pembalasan modern, misalnya Van Bemmelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini harus

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>28</sup> J. M. Van Bemmelen, *Op. Cit.*, hlm. 27.

memiliki keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana.<sup>29</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa pemenuhan keinginan untuk membalas menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri. Hanya saja, penderitaan yang diakibatkan pidana harus memiliki batas-batas yang paling sempit, dan pidana harus menyumbang proses penyesuaian kembali terpidana di masyarakat. Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif apa pun.<sup>30</sup>

Seumur hidupnya Pompe berpegang pada teori pembalasan dalam arti positif dan konstruktif, bukan tidak bermanfaat seperti pandangan orang yang antipembalasan. CHRJ Ensche menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu yang ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan didalam batas-batas pembalasan.<sup>31</sup> Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (*retributive*) adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994), hlm. 13.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- e. Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>32</sup>

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum teori relatif memiliki beberapa sifat, yaitu:

### a. Preventif pencegahan umum

Para sarjana yang membela preventif umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana. Preventif umum seperti yang diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma.

### b. Preventif pencegahan khusus

Terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi, pidana bersifat mendidik dan memperbaiki.

### c. Fungsi perlindungan

Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, (Tokyo: UNAFEI, 1974), hlm. 69.

Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*”.<sup>34</sup> Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda “*Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other homes may not be stolen*”.<sup>35</sup> Karl O. Christiansen merinci ciri pokok relatif tersebut, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
- e. Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi

---

<sup>33</sup> J. M. Bemmelen, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.



keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>36</sup>

Von Feuerbach (1755-1833) dalam bukunya, *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, yang terbit pada 1801 menyetujui teori preventif umum yang mengemukakan ancaman hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia. Ancaman hukuman menimbulkan tekanan jiwa, menimbulkan secara buatan suatu *contramotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini terkenal dengan nama *psychologische zwang*.

Ada beberapa hal yang tepat dalam teori preventif umum, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman apabila melakukan kejahatan, sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Tetapi ancaman tersebut bukan jalan mutlak untuk menahan orang melakukan kejahatan. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat ditakuti dengan cara demikian. Suatu ancaman pidana seringkali belum cukup kuat menahan mereka yang sudah merencanakan kejahatan, khususnya mereka yang sudah menjadi penjahat profesional dan sudah biasa tinggal dipenjara, psikopat, serta orang yang labil. Benar juga bahwa ancaman pidana melindungi tata hukum masyarakat secara preventif dan ancaman tersebut juga bersifat mendidik.<sup>37</sup>

Dari kacamata terpidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu

---

<sup>36</sup> Karl O. Christiansen, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>37</sup> Al-Qur'an dan terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, 1990.

gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus, yaitu hukuman harus membuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman juga harus membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat yang dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan perbaikan.<sup>38</sup>

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pembedaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pallegriano Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.<sup>39</sup>

Tujuan lainnya menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana adalah preventif umum. Akibat penting dari pidana adalah

---

<sup>38</sup> Majalah *Tempo*, 16 Februari 1980, hlm. 51.

<sup>39</sup> J. M. Van Bemmelen, *Op. Cit.*, hlm. 29.

teguran yang diberikan akan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin yang terakhir ini, Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Disamping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut teori ini antara lain, Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.



### BAB III

#### KONSEP PIDANA MATI DAN REGULASINYA DI INDONESIA

##### ***A. Pengertian Pidana Mati***

Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.<sup>1</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>2</sup>

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli, yaitu:

1. Prof. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Fitzgerald

Pidana adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran.

---

<sup>1</sup> <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian-pidana.html>

<sup>2</sup> *Ibid.*,

### 3. Prof. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Sedangkan arti mati mempunyai arti hilang nyawanya atau sudah tidak hidup lagi.<sup>3</sup> Jadi, pidana mati adalah siksaan menghilangkan nyawa seseorang untuk menerima hukuman karena telah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Dalam kamus hukum dikatakan, bahwa pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.<sup>4</sup> Menurut Rein G. Karta Soeparta, S. H, mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun/pengajuan grasi kepada negara.<sup>5</sup>

### ***B. Pemidanaan Dalam Konteks Undang-Undang***

Begitu besarnya ekspektasi masyarakat terhadap penegakkan hukum di era reformasi ini, menjadi dilematis disatu sisi sekalangan masyarakat menghendaki agar kepastian hukum dapat ditegakkan secara konsekuen dan konsisten, tetapi

---

<sup>3</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 170.

<sup>4</sup> Prof. Subekti, S. H dan Tjirosodibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), hlm. 53.

<sup>5</sup> Kein G. Kartasapoerta, S. H, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 6.

sebaliknya ada juga yang lebih mengedepankan keadilan dari pada kepastian hukum karena beranggapan sesuatu yang adil dan baik itu adalah diatas kepastian hukum (*aequum et bonum est lex legum*).<sup>6</sup>

Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik bersifat individu maupun kolektif. Banyaknya jumlah manusia dan beragamnya kepentingan mereka tidak mustahil menimbulkan pergeseran antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya perlulah dilakukan perlindungan terhadap kepentingan tersebut untuk kehidupan yang lebih baik. Perlindungan itu bisa dilakukan dengan membentuk suatu peraturan atau kaidah dengan disertai sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kaidah hukum tersebut harus diyakini dengan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan manusia yang akan berlaku di dalam masyarakat sebagai pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak baik sebagai individu maupun kelompok. Masyarakat harus menyadari bahwa hal ini patut dilakukan . Kesadaran dari masyarakat akan patut atau tidak patutnya dilakukan di dalam masyarakat inilah memberi wibawa kepada kaidah hukum sehingga hukum itu ditaati. Tanpa wibawa tersebut hukum tidak akan ditaati.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu, perlulah kiranya membangun atau melakukan pembaharuan terhadap hukum khususnya pembaharuan hukum pidana agar hukum tersebut tetap mempunyai wibawa. Pada kajian mengenai membangun

---

<sup>6</sup> Revisi dari makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya: 22 September 2012).

<sup>7</sup> <http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum.html>

atau memperbaharui hukum bukan hanya memperbaharui pasal-pasal yang kurang tepat diterapkan dengan keadaan sekarang, melainkan juga harus dikaji secara komperhensif ide dasar dari pembentukan hukum yang baru sehingga ketika diterapkan hukum tersebut tidak seperti tambal sulam.

Upaya pembaharuan hukum pidana termasuk dibidang *penal policy* merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*.<sup>8</sup> Ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional, serta upaya peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultur yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”.<sup>9</sup> L. H. C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-

---

<sup>8</sup> <http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum.html>

<sup>9</sup>Marlina, *Hukum Penentensier*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 34-35.

undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan".<sup>10</sup> Pengertian ppidanaan melahirkan dua pemahaman yaitu pengertian luas, suatu proses pelaksanaan pidana yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan oleh kepolisian dan kejaksaan berupa penyelidikan dan penyidikan. Dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan yang berakhir dengan vonis hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sistem ppidanaan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut substantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

#### 1. Dari sudut fungsional

Dilihat dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, sistem ppidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/kongkretisasi pidana. Dan atau keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem ppidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan sistem

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 141.



pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakan secara kongkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

## 2. Dari sudut norma substantif

Jika dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>11</sup>

### C. *Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia*

Hukuman dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut oleh bangsa Romawi sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.<sup>12</sup>

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat.<sup>13</sup> KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 261.

<sup>12</sup> Materi ini revisi dari materi yang disampaikan dalam Seminar Nasional Universitas Brawijaya (Malang: 11 Juni 2012).

<sup>13</sup> Dasar hukum tertuang dalam Pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan Pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia salah satu dari 71 negara yang masuk kategori *retentionist country* terhadap pidana mati secara *de jure* dan *de facto* mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa.

(*ordinary crimes*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada 1982.

### 1. Menurut KUHP

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain<sup>14</sup>:

1. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).

---

<sup>14</sup> Yon Artiono Arba'i, *O.p. Cit.*, hlm. 105-106.

6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
7. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
9. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
10. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman pidana matinya terlalu tinggi apabila di analisis dari sisi kekuatan hukum pidana.<sup>15</sup> Dasar pertimbangannya adalah:

1. Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingan 1/3, namun dalam pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati.
2. Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari

---

<sup>15</sup>Rudy Satriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 47-48.

permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap permulaan pelaksanaan.

3. Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga termasuk dalam persoalan penyertaan (*deelneming*) pada bagian pembantuan. Pemidanaan untuk peran tersebut justru diperingan 1/3, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
4. Terakhir, presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakkan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.<sup>16</sup>

## 2. Di Luar KUHP

Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

1. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya: "*Barang siapa yang*

---

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Pakar Hukum Pidana* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 9.

*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.*

2. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No. 80.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 130.
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26.

5. Penpres RI No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.
6. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam BAB XIV tentang ketentuan pidana, pasal 59 sampai pasal 72 UU No. 5 Tahun 1997. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya pidana penjara juga diatur dalam KUHP, yaitu seumur hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. Sementara dalam UU No. 5 Tahun 1997, juga diatur minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bisa dijatuhkan hakim. Demikian pula dengan minimal pidana dendanya.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Grasi No. 3 Tahun 1950 L. N. No. 40 Tahun 1950.<sup>18</sup>

Terlepas dari permasalahan-permasalahannya, semua undang-undang yang telah dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia yang diwakili pemerintah dan DPR

---

<sup>17</sup> Yon Artiono Arba'i, *O.p. Cit.*, hlm. 107-111.

<sup>18</sup> Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 75.

serta diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sendiri tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum atau perasaan keadilan masyarakat masih menghendaki eksistensi hukuman mati. Tidak ada alasan bagi mereka yang antihukum mati untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai lagi diterapkan di era demokrasi saat ini. Eksistensi hukuman mati dalam KUHP produk nasional dapat dipertanggungjawabkan bila ditinjau dari sisi penyusun dan yang menetapkannya.

### **3. Dalam RKHUP Nasional**

Pidana pokok dalam naskah RKUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) tahun 1999-2000 pada bagian kedua pidana paragraf I jenis pidana pasal 60 ayat (1) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dari pasal 60 ayat (1) tersebut tidak ditemukan pidana mati sebagai pidana pokok. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan KUHP BAB II pasal 10. Jenis-jenis hukuman dalam undang-undang itu terdiri dari hukuman-hukuman pokok. KUHP ini dengan tegas menyebut pidana mati sebagai salah satu pidana pokok.

#### ***D. Pandangan Tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Alasan Hukumnya***

Pidana mati merupakan pidana puncak dari seluruh sanksi pidana. Jenis pidana ini mengakhiri kehidupan seseorang secara hierarkis dan substantif. KUHP pasal 10 menempatkan pidana mati pada urutan teratas yang secara implisit mengindikasikan bahwa hukuman mati merupakan pidana terberat diantara sekian banyak pidana pokok di dunia, tidak terkecuali sistem hukum pidana di Indonesia. Hukuman mati dapat dilaksanakan apabila segala upaya banding terdakwa,

penasehat hukum, atau ahli warisnya telah selesai, dan biasanya diakhiri dengan dikeluarkannya grasi.

Masing-masing negara memiliki dasar yang berbeda untuk penerapan pidana mati. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, kegigihan mempertahankan pidana mati merupakan akibat firman yang jelas dalam Islam, sebaliknya di negara-negara demokrasi liberal parlementer Barat di mana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat.

Opini publik kerap menjadi faktor penentu keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (*retain*), menghapuskan (*abolish*), atau memberlakukan kembali (*reinstate*) pidana mati. Langkah-langkah kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) tanpa disertai dukungan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, memicu tindakan pembalasan pribadi, serta dianggap antidemokrasi. Kebijakan penal semacam ini tak terlepas dari ideologi politik dan dari mana kepercayaan terhadap kewenangan hukum berasal.<sup>19</sup>

Opini publik seringkali bervariasi, tergantung penguasaan materi sebelum memberikan opini. Opini yang diberikan setelah atau sebelum memahami telah diaturnya sanksi alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau remisi (*life imprisonment without parole*) dan pemberian restitusi bagi keluarga korban atas dasar konsep *Restorative Justice* yang berkembang karena pengaruh viktimologi, tampak berbeda. Di Amerika Serikat ada kecenderungan masyarakat yang posisinya lebih kuat lebih pro hukuman mati dibandingkan dengan golongan yang

---

<sup>19</sup> Muladi, *Pengkajian Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 22.



secara politis lebih lemah. Namun, secara umum hasil jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan 70% masyarakatnya masih mendukung adanya pidana mati.<sup>20</sup>

Opini publik di negara-negara yang masuk kategori *non ideologically* di Amerika Serikat seringkali lebih bersifat emosional. Hal ini terkait pula dengan *the felling of helplessness*. Mempertahankan pidana mati sangat berkaitan dengan ketakutan terhadap kejahatan berat. Pada 1997 *the America Bar Association* (ABA) mengeluarkan resolusi yang menganjurkan penundaan atau penangguhan (moratorium) pelaksanaan pidana mati sampai adanya kebijakan dan tata cara yang menjamin bahwa kasus pidana mati telah diputus dan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak dalam kerangka *due process*; dan memperkecil resiko bahwa orang yang tidak bersalah dieksekusi.<sup>21</sup>

Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad silam. Bahkan, pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak di berlakukannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sanksi ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Hukum Pidana UU No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* menjadi *Wetboek van Strafrechth* yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP.

Sampai saat ini KUHP masih mencantumkan hukumn mati sebagai salah satu jenis pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pro dan kontra pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah berlansung

---

<sup>20</sup> Izha Fadri, *Perundang-undangan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 79-80.

<sup>21</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 25.

lama. Pasang surutnya seirama dengan perkembangan hukum ditanah air. Kaum abolisioner menentang hukuman dengan alasan bertentangan dengan HAM, terutama hak untuk hidup.

Wacana pidana mati kembali menguat terkait belum dilaksanakannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut atas beberapa terpidana. Mengapa demikian? Ada beberapa problem krusial menyangkut pidana mati dinegeri ini. Pada perinsipnya, pemidanaan di Indonesia bukanlah sebuah pembalasan dendam, melainkan upaya preventif dengan menekan efek deretan (pangkal) perkembangan kejahatan itu sendiri. Sedangkan secara substantif, hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10, namun pelaksanaannya masih mengacu pada Penpres Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.

Pidana mati termasuk jenis pidana tertua di dunia. Kitab-kitab suci menyebut pidana mati bisa digolongkan sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Adagium mata dibayar mata dan gigi dibayar gigipun dikenal. Kitab Taurat, Injil, dan Al-qur'an juga mengenal pidana mati. Bahkan, umat Hindu Bali mengenal pidana pembuangan kelaut, seperti pembuangan orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan.<sup>22</sup> Pidana mati yang tercantum dalam KUHP yang berlaku sejak Januari 1918. Pemerintah Belanda memasukan pidana mati ke dalam WvS (sekarang KUHP), karena wilayah indonesia yang luas dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Tenaga polisi pada

---

<sup>22</sup> Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*, hlm.123.

saat itu kurang sehingga perlu ada sanksi berat untuk menertibkan rakyat. Di samping itu, atas alasan yang sama, pidana penjara dalam KUHP lebih berat dibandingkan dengan pidana dalam WvS Belanda yang memulai berlaku sejak tanggal 17 September 1870.

Hukuman mati memang masih kontroversial. Sebagaimana kalangan menganggap hukuman mati masih diperlukan dengan alasan pemenuhan rasa keadilan dan pencegahan tindak pidana serupa, sementara kelompok yang kontra menjadikan rasa kemanusiaan sebagai dasar argumentasi mereka<sup>23</sup>. Berikut ini pendapat yang kemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia yang Pro dengan pidana mati, yaitu:

1. K. H. Abdurrahman Wahid

Berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba, menurutnya Departemen Hukum dan Perundang-undangan sebaiknya merivisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997, dengan memperberat minimal bagi pengedar narkoba dan mempercepat kemungkinan eksekusi hukuman mati. Hal itu juga perlu diterapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tb. Ronny R. Nitibaskara

Menurut Guru Besar Kriminolog UI ini, hukuman mati memang sangat efektif untuk memerangi narkoba. Hukuman mati juga diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keluarga korban pembunuhan

---

<sup>23</sup>*Ibid* ., hlm. 135.

berencana akan merasa diperlakukan adil kalau pelakunya dijatuhi hukuman mati.

3. Yusril Ihza Mahendra

Sampai saat ini hukuman mati masih tetap relevan diterapkan, walaupun majelis hakim jarang memberlakukannya. Hukuman mati di Indonesia tetap mengacu pada Keputusan Presiden yakni selalu hukuman tembak, Indonesia tidak lagi melaksanakan hukuman gantung seperti Malaysia, karena hukuman mati tembak lebih manusiawi dari pada hukuman gantung atau dengan cara lain.

4. Wila Chandra Wila S.

Hukuman mati memang masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, tetapi penerapannya harus amat selektif. Apabila kepastian tentang hukuman mati sudah bulat, eksekusi harus segera dilaksanakan sebab masa penantian yang panjang akan memberatkan pidana.

5. Achmad Ali

Hukuman mati tetap dibutuhkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi, kejahatan narkotik, atau pembunuhan. Namun, hakim juga perlu memutuskan hukuman berdasarkan pertimbangan sosiologis. Dalam kasus korupsi, misalnya, penjahat kelas kakap tidak boleh disamakan dengan kelas teri yang terpaksa korupsi untuk melindungi keluarganya.

#### 6. Sarlito Wirawan

Ahli psikologi ini berpendapat hukuman mati masih perlu dipertahankan sebagai upaya untuk menekan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, tetapi harus diterapkan selektif mungkin.

Untuk yang kontra terhadap pidana mati ini, mereka juga mempunyai alasan yang sangat komprehensif, diantaranya pendapat dari Ketua Perhimpunan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendarli, dengan tegas mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan.<sup>24</sup> Hal ini dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) karena secara substansial bertentangan dengan Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, yakni: pasal 3 yaitu “tiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan, dan keamanan diri pribadi” dan pasal 5 yaitu “ tak seorangpun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berprrikemanusiaan atau merendahkan martabat”.

Hukuman mati sendiri secara diametral bertentangan dengan pembaruan *policy* untuk memberikan remisi terhadap pelaku kejahatan yang dihukum seumur hidup serta berlandaskan pada konsep sistem pemasyarakatan yang sejak lebih dari tiga dasawarsa, yakni sejak 1964, berorientasi pada resosialisasi dan integrasi sosial terpidana, artinya memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan yang dipidana untuk memperbaiki diri, dan mendorong masyarakat untuk menerima kembali terpidana.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 136

Prespektif pencegahan umum dalam penerapan hukuman mati tidak beralasan sebab tidak terdapat data yang menunjukkan pengurangan kejahatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, Hendar di juga mengatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional pernah menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak lagi mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman pokok. Hukuman mati dicantumkan dalam pasal-pasal lain yang hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Jejak pendapat secara acak terhadap beberapa kelompok penegak hukum yang dilakukan oleh salah seorang anggota kejaksaan RI, yaitu DR. Yon Artiono Arba'i, S. H., M. H, mengatakan bahwa secara umum pendapat mereka hampir sama, yaitu hukuman mati masih perlu dipertahankan.<sup>25</sup>

Hasil kuesioner yang disebar di kalangan pengacara menyimpulkan perlunya mempertahankan pidana mati. Seluruh responden setuju bahwa hukuman mati setidaknya menjadi ancaman agar orang tidak berani melakukan kejahatan tertentu. Namun, mereka menekankan penerapannya harus sangat selektif mengingat hampir semua negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Hukuman mati bahkan tidak tercantum dalam Konvensi Internasional PBB. Bahkan dalam Amandemen UUD 1945 pun, hukuman mati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagian besar kelompok hakim seperti kelompok pengacara, menghendaki pidana mati untuk kejahatan tertentu. Ironisnya, walaupun pidana mati telah diterapkan khususnya dalam narkoba, pembunuhan berencana, dan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

perkosaan, tingkat kejahatan tetap tidak berkurang. Bahkan khusus narkotik cenderung meningkat. Hal ini yang demikian perlu dipertanyakan tentang efektivitas hukuman mati.

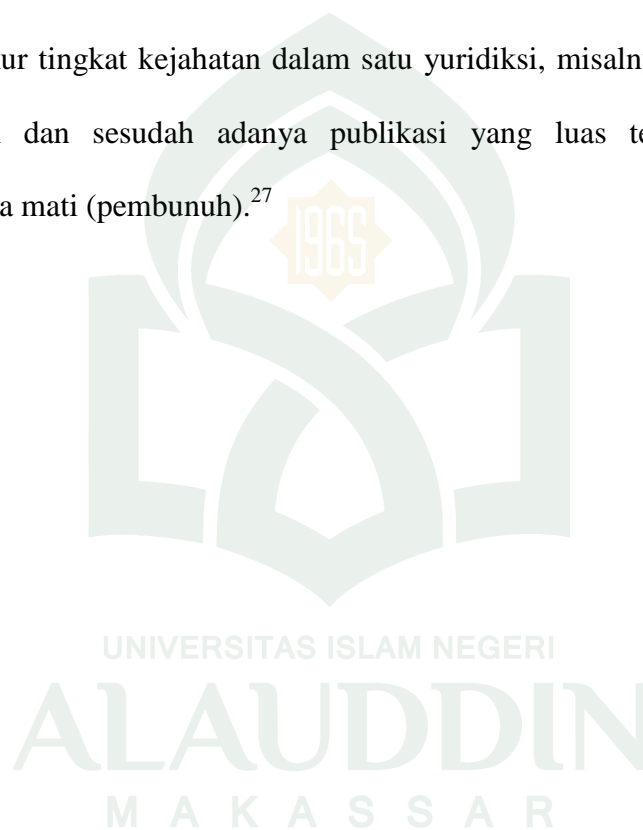
Pada kelompok jaksa, dari 10 responden, hanya dua orang yang menyatakan tidak menyetujui ancaman maupun pelaksanaan hukuman mati. Mereka menyarankan penjara seumur hidup sebagai substitusi pidana mati. Delapan yang lain mengakui perlunya penerapan hukuman mati pada kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, pembunuhan berencana, pemerkosaan, atau perbuatan yang benar-benar mengancam kehidupan ketatanegaraan dan yang tidak manusiawi, termasuk teror.

Usaha mencari pembenaran terhadap eksistensi pidana mati selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, mulai dari yang paling sederhana, yaitu teori pembalasan atau teori absolut, kemudian teori utilitarian atau teori relatif, sampai dengan teori gabungan. Sifat pencegahan umum dalam teori relatif yang berfungsi menimbulkan rasa takut dengan penerapan pidana mati masih diragukan efektivitasnya dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup atau 25 tahun tanpa pengurangan. Efektivitas pidana mati bisa saja berbeda-beda, tergantung pada jenis kejahatannya, pengaruh jangka panjang atau pendek, kemungkinan eksekusi, dan sebagainya.<sup>26</sup> Menurut Norval Morris (1967), tes terhadap pidana mati dapat dilakukan dengan tiga cara standar, yaitu:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

1. Mengukur tingkat kejahatan yang diancam pidana mati, seperti pembunuhan, dalam sebuah yuridiksi tertentu, sebelum dan sesudah dihapuskan atau diaktifkannya kembali pidana mati;
2. Membandingkan tingkat kejahatan (*the rate of crime*) dari dua atau lebih yuridiksi yang sama, kecuali salah satunya telah menghapuskan pidana mati;
3. Mengukur tingkat kejahatan dalam satu yuridiksi, misalnya pembunuhan, sebelum dan sesudah adanya publikasi yang luas tentang eksekusi terpidana mati (pembunuh).<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Muladi, *Pengkajian Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 5.



## BAB IV

### PIDANA MATI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM ISLAM

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)***

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang artinya “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, dan dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental.<sup>1</sup>

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.<sup>2</sup> HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, semua orang berhak menikmati haknya tersebut.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakanyahiqqu ‘*alaika an taf’ala kadza*, itu artinya kamu wajib

---

<sup>1</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 7.

<sup>2</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 165.

melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. “HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia”.<sup>3</sup>

Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.<sup>4</sup>

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dapat dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.<sup>5</sup> Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia adalah

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

<sup>4</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 57-58.

<sup>5</sup>Abdul Rochim C. N. (Trans) Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 55.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prof. Darji Darmodiharjo, S. H., dalam buku A. Masyur Effendi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Sedangkan R. Kirk dalam buku A. Masyur Effendi memberi definisi, “*human rights as signifying all privileges and ammunities prosseces by human being in a civil social order*”.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan sejarah perkembangan HAM pada prinsipnya sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan hak asasi manusia itu sudah dimulai segera setelah ditandatangani Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland, maka seringkali peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Sebab yang dimuat dalam Magna Charta tak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja, tetapi dilihat dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia (walaupun khusus untuk bangsawan dan gereja) Magna Charta dapatlah dicatat sebagai yang pertama dan bukan sebagai yang permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>A. Masyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 20.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>8</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hlm. 307.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam satu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa.<sup>9</sup>

Peraturan-peraturan HAM internasional berakar dalam Piagam PBB. Ditetapkan dengan prinsip-prinsip yang secara universal dapat diterima mengenai harkat dan martabat manusia. Pendirian PBB mempersentasikan titik kritis dalam perkembangan kesadaran manusia. Trauma perang dunia II, kejahatan yang secara luas menimpa manusia termasuk pembersihan suku (*genocide*), pembunuhan massa, dan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap kemanusiaan merangsang pemerintah-pemerintah menuntut dan membentuk standar perlindungan warga negara oleh pemerintahannya secara masing-masing.<sup>10</sup>

Upaya pertama untuk mengkodifikasi standar-standar semacam itu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1947. Deklarasi diakui sebagai standar bagi semua manusia dan semua bangsa untuk memperjuangkan penegakkan martabat manusia. Diantara hak-hak yang termuat dalam deklarasi itu adalah hak kesetaraan, bebas diskriminasi, hidup, kebebasan dan keamanan jiwa, bebas dari perbudakan, siksaan dan perlakuan kejam, perlakuan kesetaraan didepan hukum dan pengadilan, dan kebebasan berekspresi

---

<sup>9</sup>Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>10</sup>Mohammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan (Membela Hak Mewujudkan Perubahan)*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 19.

dan partisipasi politik.<sup>11</sup> Majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal itu pada tanggal 10 Desember 1948. Seperti kebanyakan rekomendasi Majelis Umum PBB lainnya, DUHAM sifatnya tidak mengikat. Sebagian besar negara tidak meratifikasi DUHAM karena mereka menginginkan traktat formal yang secara hukum mengikat. Kendati demikian semua komentator sekarang sepakat bahwa pasal-pasal deklarasi itu telah menjadi mengikat ketika menjadi bagian hukum hukum nasional.<sup>12</sup>

Konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya telah melampaui empat generasi perkembangan. Keempat generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:<sup>13</sup>

### 1. Generasi Pertama

Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era “*enlightenment*” di Eropa, mengikat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Right* PBB pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Right*, di Amerika Serikat dengan *Decalaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Right of Man and of the Citizen*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi

---

<sup>11</sup>*Ibid*,

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ditulis Dalam Rangka Diskusi Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, 2000).

manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

## **2. Generasi Kedua**

Konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya "*Intenational Couvenant on Economic, Social and Cultural Right*" pada tahun 1966.

## **3. Generasi Ketiga**

Pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau "*right of development*". Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.

Namun demikian, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam

suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai “*crime by government*” yang termasuk ke dalam pengertian “*political crime*” (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian “*crime against government*” (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan diatas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.<sup>14</sup>

#### 4. Generasi Keempat

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antara satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Penegakkan HAM di Indonesia dimulai dengan munculnya Keppres R. I. No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) yang mempunyai tugas, yaitu:<sup>15</sup>

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 212.

2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi.
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
4. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dibidang HAM.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah perkembangan kemajuan penting mengenai upaya bangsa Indonesia untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/ 1998, kemudian Amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan Pengadilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM, atau sebaliknya penegakkan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah konvensi PBB tentang HAM seperti tentang hak-hak perempuan, hak anak atau konvensi tentang anti diskriminasi serta konvensi tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Adnan Buyung Nasution, *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, disampaikan dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, 2003).



Bagir Manan menjelaskan bahwa hak asasi manusia dikategorikan menjadi:<sup>17</sup>

1. HAM yang bersifat klasik dan sosial. Hak-hak yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945.<sup>18</sup> Sementara hak yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1), dan pasal 24 UUD 1945.<sup>19</sup> Hak yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan sebagai hak sosial, namun sebagai kemerdekaan, contohnya rumusan pasal 28 dan 29 ayat (2) UUD 1945.
2. HAM berkenaan dengan warga negara Indonesia. Hal ini dapat dibaca pada pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1). Sedangkan hak asasi yang berlaku khusus pada warga negara dapat dikategorikan ke dalam hak asasi yang timbul karena hukum (*legal rights*).

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan langkah maju, meskipun banyak menimbulkan polemik terutama tentang pemberlakuan asas retroaktif. Beberapa kalangan dan para ahli hukum pidana berpendapat diberlakukannya asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD RI

---

<sup>17</sup>Bagir Manan, *Dalam Demokrasi Pancasila*, (Bandung: Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pengajar Pancasila, 1998), hlm. 35.

<sup>18</sup>HAM klasik, seperti hak untuk hidup dan mengemukakan pendapat, memiliki pengertian sebagai larangan bagi negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Contohnya, kewajiban negara untuk tidak membunuh atau melakukan sensor atas informasi.

<sup>19</sup>HAM sosial memiliki pengertian kewajiban bagi negara untuk aktif, contohnya dalam menjamin hak asasi warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan dengan cara membangun sekolah atau menciptakan perekonomian yang sehat. HAM sosial lebih sulit dilaksanakan.

1945 dan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Terlepas dari perbedaan pandangan dalam penafsiran tentang HAM dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diatas, maka dapat dipandang bahwa rakyat dan bangsa Indonesia telah berada dalam koridor rakyat dan bangsa yang beradab menurut standar internasional karena undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh nilai-nilai yang melegalisasi HAM di Indonesia.<sup>20</sup>

Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah hak satu individu dapat membatasi hak individu lain? Atau hak tersebut secara mutlak adalah milik masing-masing individu, sehingga akan ada kesenjangan yang terjadi ketika hak itu bertabrakan dengan hak individu lain. Kita ambil contoh hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi) yang menurut Universal Declaration of Human Right adalah sebagai salah satu dari lima hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Hak personal disini mencakup seluruh hak kebebasan individu untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Seorang teroris yang telah menghilangkan banyak nyawa memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang diinginkannya. Namun disisi lain, orang-orang yang merasa terancam dengan keberadaan teroris tersebut juga memiliki hak perlindungan hukum. Maka hak teroris untuk bebas menjalani hidup yang dipilihnya telah dibatasi oleh hak orang lain yang membutuhkan perlindungan. Disini jelas bahwa Hak Asasi Manusia bukan lagi menjadi hak yang

---

<sup>20</sup>Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 214.

paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena hak seseorang akan terbatas oleh hak orang lain.<sup>21</sup>

HAM hanya akan melanggar hak asasi itu sendiri. yang sekarang dijadikan sekelompok manusia sebagai alasan untuk dapat mencampuri urusan suatu kelompok lain dengan berlandaskan HAM. Dengan melihat kasus-kasus pelanggaran HAM, maka dapat dipastikan konsep HAM ini tidak dapat menjamin sebuah kehidupan yang aman, tentram dan damai. Karena jika setiap individu melakukan hal yang berlandaskan HAM, maka yang akan muncul adalah egoisme-egoisme sosial yang kuat dalam masyarakat.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul karena klaim-klaim yang mengatasnamakan HAM, maka solusi yang paling cocok adalah adalah sumber egoisme-egoisme sosial dapat diluruskan kembali dengan ideologi Kewajiban Asasi Manusia (KAM).

Kewajiban Asasi Manusia ini akan memberi solusi yang cukup besar untuk mengatasi kehidupan modern sekarang. Kehidupan yang kini penuh dengan keegoisan individu itu terjadi karena hilangnya pemenuhan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Jika yang kita pakai sebagai ideologi adalah Kewajiban Asasi Manusia, maka secara otomatis hak-hak seluruh individu juga dapat terpenuhi. Semisal, salah satu kewajiban dasar manusia adalah menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, maka hak orang lain tersebut sudah secara otomatis terpenuhi. Berbeda jika yang didahulukan adalah

---

<sup>21</sup> <http://risalatul-hukmi.blog.ugm.ac.id/2013/04/22/kewajiban-asasi-manusia-dan-hak-asasi-manusia>.

hak untuk dihormati, maka yang terjadi adalah tuntutan-tuntutan bersifat egois yang muncul. Begitu juga dengan hak manusia untuk hidup. Jika setiap individu melakukan kewajibannya untuk menghormati kehidupan orang lain, maka secara otomatis hak orang lain untuk hidup juga akan terpenuhi.<sup>22</sup>

Maka jelaslah sudah, untuk membangun sebuah kehidupan modern yang harmonis. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah KAM, bukan HAM. Banyak kewajiban-kewajiban dasar manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban kepada Tuhan, kewajiban pada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitarnya. Dengan begitu, maka kehidupan ini akan bisa berjalan harmonis. Hubungan dengan Tuhan pasti terjaga, hubungan kepada sesama manusia juga terjaga, dan alam juga akan terjaga kelestariannya. Bukankah tujuan hidup seperti itu yang kita harapkan?

KAM menurut Islam adalah beriman kepada Allah SWT, merupakan kewajiban asasi bagi tiap manusia, bahkan merupakan kewajiban asasi yang paling asasi. Demikian asasi kewajiban bagi manusia untuk beriman kepada Allah SWT, bahkan sejak masih di alam arwah dahulu, Allah SWT telah memperingatkan hal ini kepada manusia, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al- A'raf ayat 172, yaitu:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

<sup>22</sup> <http://risalatul-hukmi.blog.ugm.ac.id/2013/04/22/kewajiban-asasi-manusia-dan-hak-asasi-manusia>.

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”<sup>23</sup> (QS al-A'rāf/7: 172)*

Yang termasuk dalam Kewajiban Asasi Manusia (KAM) adalah:

1. Beriman kepada Allah SWT

Beriman kepada Allah SWT merupakan kewajiban asasi bagi tiap manusia, bahkan merupakan kewajiban asasi yang paling asasi.

2. Beramal saleh

KAM pertama beriman kepada Allah SWT sekaligus mengharuskan adanya KAM kedua yaitu beramal saleh. Amal saleh dalam garis besar ada dua, yaitu amal saleh vertikal artinya amal saleh dalam kaitan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan amal saleh horizontal atau amal saleh dalam kaitan dengan sesama manusia (*hablum minannas*).

3. *Syahadatain* (bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah).

4. Sholat

5. Zakat

Adapun zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan telah diwajibkan Allah dalam kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya, serta ijma' (kesepakatan) ummatnya.

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2010), h. 519.

## 6. Ibadah Haji

Ibadah haji adalah salah rukun Islam yang lima dan diwajibkan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' ummat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 97, yaitu:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ <sup>ط</sup>  
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ط</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ <sup>ط</sup>

Terjemahnya:

*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.<sup>24</sup> (QS Āli 'Imrān/3: 97).*

## 7. Ibadah Puasa

Puasa adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ <sup>ط</sup>  
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ <sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ <sup>ط</sup>  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ <sup>ط</sup>  
عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ <sup>ط</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), h. 4-5.

Terjemahnya:

*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.<sup>25</sup> (QS al-Baqarah/2: 185)*

8. Menyampaikan Amanah

9. Berbakti Kepada Orang Tua

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِنَّمَا يَبُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ﴾

Terjemahnya:

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>26</sup>*

10. Memelihara Hubungan Kekeluargaan

**B. Pidana Mati Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), h. 269.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), h. 458.

itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.<sup>27</sup>

Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik. Adanya perubahan dalam arti dan bentuk pidana ternyata tergantung dari perubahan pandangan hidup yang menjadi pendukungnya, sewaktu mengenai kehidupan manusia hanya dikenal unsur badan dan jiwa sebagai milik pokok, maka untuk membuatnya jera dan menakutkan warga masyarakat lainnya selain pidana badan dikenakanlah pidana mati sebagai pidana utama.

Arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana pada prinsipnya tidak terlepas dari perubahan sepanjang masa. Akan tetapi meskipun demikian pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan, ini merupakan suatu jawaban yang tradisional dan masih dianut sampai sekarang.

Dalam pada itu adapula sementara pandangan dewasa ini yang melihat pidana sebagai salah satu jawaban terakhir walaupun sampai saat ini belum dapat diberikan jawaban yang memuaskan mengapa orang melakukan kejahatan dan

---

<sup>27</sup>Yahya Ahmad Zein, *Op. Cit.*, hlm. 156.



mengapa setelah orang itu dipidana mati untuk kejahatan yang dilakukannya masih ada saja orang lain yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

Memang merupakan suatu kenyataan bahwa tiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan calon-calon pembunuh selain dengan ancaman pidana mati. Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak berbagai ragam berkaitan dengan pidana mati ini maka pro dan kontra pun tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.

Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati ini khususnya jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Kekhawatiran adanya kemungkinan kekhilafan hakim (*gerechtelijke dweling*) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada putusan hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin terjadi *error in persona* (pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah) sehingga ini kemudian melanggar Hak Asasi Manusia di mana hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus klasik yang mendukung dimana pada abad ke-17 hiduplah seorang petani bernama Joan Galles yang pada suatu ketika dituduh membunuh anaknya. Hakim pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. Voltaire seorang pujangga

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 157

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 158.

dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan bahwa Joan Galles tidak bersalah, sehingga Joan Galles direhabilitasi. Tapi apa gunanya lagi karena yang bersangkutan telah meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian mengundang respon negatif terhadap eksistensi pidana mati sehingga menjadi masalah dalam penerapannya.

Contoh lain yang juga cukup menggemparkan terkait dengan kekhilafan hakim ini juga terjadi di Italia. Dimana seorang yang tidak bersalah hampir saja akan lenyap nyawanya dibawah Guillotine, ketika eksekusi ingin dilakukan dan kapak ingin dijatuhkan, namun karena kerusakan teknis kapak itu berhenti dan macet tergantung beberapa jari saja diatas lehernya, satu menit kemudian datanglah Espresso membawa berita bahwa orang itu tidak bersalah sedangkan orang yang sebenarnya bersalah sudah berhasil ditangkap. Hal ini kemudian hampir menyebabkan pelanggaran HAM yang pokok akibat kekhilafan hakim.

2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pembedaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan, kemudian melahirkan problem dalam penerapan pidana mati tersebut.

3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai dengan salah satu sila dari Pancasila yakni sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah satu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya pertentangan dengan salah satu maksud atau tujuan pemidanaan yang ditunjukkan bukan sebagai sarana untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat dipastikan melanggar dari maksud atau tujuan pemidanaan. Sehingga kemudian penerapan pidana mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari salah satu tujuan pemidanaan karena sifatnya yang tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.

Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis. Dalam budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, hukuman mati selalu dianggap sebagai kontroversi. Betapa tidak, dalam hukum yang sama, dipatok larangan membunuh sekaligus perintah hukuman mati. Lepas dari sistem hukum dewasa ini, ada semacam pandangan umum bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan pri kemanusiaan.

## 1. Pihak-Pihak Yang Kontra Pidana Mati

Sejak Casare Beccaria,<sup>30</sup> seorang sarjana Italia pada akhir abad ke-18, didalam bukunya “*delitti Dei e delle pene*” (tentang kejahatan dan hukuman) telah mencela stelsel pidana mati, dimana dia tidak menyetujui dan menentang pidana mati dijalankan didalam masyarakat, yang pada pokoknya mengajukan alasan bahwa pidana mati itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan sosial contract (Ingat: doktrin sosial kontrak dari Rousseau) yang mana pidana mati dipandang oleh Beccaria sebagai perbuatan yang immoral, tidak adil dan tirani.

Prinsip-prinsip yang Beccaria ajukan adalah pemahaman tentang negara sebagai bentuk kontrak sosial, dan diatas segalanya, prinsip utilitas, atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Beccaria sangat dipengaruhi Jeremy Bentham<sup>31</sup> untuk mengembangkan kedalam skala doktrin penuh utilitarianisme. Beccaria secara terbuka mengecam hukuman mati pada dasarnya karena dua alasan, yaitu:

- a. *The state does not possess the right to take lives*; (negara tidak memiliki hak untuk mengambil hak hidup seseorang); dan
- b. *Capital punishment is neither a useful nor a necessary form of punishment*; (hukuman mati pada dasarnya tidaklah berguna atau bukan bentuk hukuman yang penting dari hukuman).

---

<sup>30</sup>Cesare, Marquis dari Beccaria-Bonesana (15 Maret 1738- November 28, 1794) adalah seorang filsuf Italia dan politisi terkenal karena karyanya *Pada Kejahatan dan Hukuman* (1764), yang mengutuk penyiksaan dan hukuman mati, dan karya pendiri di bidang ilmu pidana, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare\\_Beccaria](http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria)).

<sup>31</sup>Jeremy Bentham, adalah seorang ahli hukum Inggris, filsuf, dan sosial pembaharu hukum. Ia menjadi seorang ahli teori terkemuka di Anglo-Amerika filsafat hukum, dan politik yang radikal ide mempengaruhi perkembangan welfarisme. Ia terkenal untuk advokasi tentang utilitarianism, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy\\_Bentham](http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham)).

Beberapa prinsip yang inovatif dan berpengaruh yang telah dikembangkan Beccaria dalam risalahnya yakni:

- a. *Punishment had a preventive (deterrent), not a retributive function;* (hukuman harus memiliki fungsi preventif atau pencegahan, bukan memiliki fungsi retributif).
- b. *Punishment should be proportionate to the crime committed;* (hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan).
- c. *The certainty of punishment, not its severity, would achieve the preventive effect;* (kepastian hukuman, tidak terletak pada tingkat keparahannya, akan mencapai efek pencegahan).
- d. *Procedures of criminal convictions should be public; and finally;* (prosedur keyakinan pidana harus publik).
- e. *In order to be effective, punishment should be prompt;* (agar menjadi efektif, hukuman harus cepat).

Sejalan dengan Beccaria, Francois Marie Arouet<sup>32</sup> (lahir 21 November 1694- meninggal 30 Mei 1778 pada umur 83 tahun), lebih dikenal nama penanya Voltaire. Voltaire dikenal dengan tulisan filsafatnya yang tajam, dukungan terhadap hak-hak manusia, dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang patut (*fair trial*). Voltaire adalah pendukung terhadap reformasi sosial walaupun Perancis saat itu menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Ia

---

<sup>32</sup>Penulis dan Filsuf Perancis pada Era Pencerahan.

sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Perancis pada saat itu. Voltaire dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zamanya.<sup>33</sup>

Voltaire juga menentang pidana mati, berbeda dengan Beccaria, Voltaire mengemukakan dasar pandangannya dari sudut lain untuk menghapuskan pidana mati, yaitu meninjau dari sudut utiliteit. Selain Voltaire masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam sejarah dunia yang turut menentang diadakannya pidana mati, dapat disebutkan misalnya:

**a. Jean Paul Marat<sup>34</sup>**

Marat adalah salah satu yang bersuara ekstrem dari revolusi Perancis dan ia menjadi pembela kuat dari kulot sans, Marat menyiarkan pandangannya melalui berbicara didepan umum, menulis esai, dan jurnalisme surat kabar, yang membawa pandangannya diseluruh perancis.

**b. Van Bemmelen**

Menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.<sup>35</sup>

**c. Roling**

Pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang

---

<sup>33</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Voltaire>.

<sup>34</sup>Marat (24 Mei 1743-13 Juli 1793) kelahiran Prusia, adalah seorang dokter, ahli teori politik, dan ilmuwan terkenal karena karirnya di Perancis sebagai wartawan radikal dan politikus selama Revolusi Perancis.

<sup>35</sup>Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (digital Library USU, 2003), <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>.

pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu ada lagi suatu bahaya, bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.<sup>36</sup>

**d. Von Henting**

Menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tidak mungkin ditemukan pada pidana mati.

**e. Leo Polak**

Beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.

**f. Ing Dei Tjo Lam**

Menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

**g. J. E Sahetapy**

Juga menganggap sebagai penentang pidana mati. Walaupun terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana. Dalam disertasinya yang berjudul *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, beliau memberikan hipotesa sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP dewasa ini dalam prakteknya merupakan suatu ketentuan *abolisi de facto*.
- 2) Ancaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada beberapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim.
- 3) Dari segi kriminologi sangat diragukan manfaat pidana mati.

**h. Roeslan Saleh**

Menyatakan bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya. Beliau jug membuat suatu karangan yang menguraikan mengapa pidana mati tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, yang antara lain dengan mengajukan alasan-alasan bahwa pidana mati pada pokoknya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beliau juga mengemukakan ada 3 sudut pandang kelemahan dari pidana mati:



- 1) Sudut pandang umum.
- 2) Sudut dasar hukum dari pada peraturan pidana mati yang ada dalam KUHP.
- 3) Dari sudut pandang Pancasila.

Sudut pandang yang ketiga inilah yang kemudian dijadikan landasannya mengatakan bahwa pidana mati tidak layak dan pantas diterapkan di Indonesia, oleh karena itu Rueslan Saleh lebih menekankan kepada penjara seumur hidup dan pidana lain yang merupakan pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dapat dipandang sebagai pidana sedangkan pidana mati tidak.

Selain alasan tersebut diatas, Rueslan Saleh juga mendasari pendapatnya yang menentang pidana mati dengan alasan demoralisasi, dimana pidana mati dianggap sebagai pidana yang merendahkan kewibawaan negara, dimana pidana mati dianggap sebagai bukti bahwa negara telah memberikan contoh teladan yang buruk.<sup>37</sup>

Gerakan pidana mati ini terus menjalar dari Italia menuju Australia, Perancis, dan terus ke Jerman. Mereka menentang pidana mati bukan hanya terdapat dikalangan ahli-ahli negara dan criminalisten, akan tetapi ada juga raja-raja yang sedang berkuasa juga menentang pidana mati tersebut, misalnya Raja

---

<sup>37</sup>Yahya Ahmad Zein, *Op. Cit.*, hlm. 150.

Louis dari Portugal, Raja Johan dari Soksen dan Raja Oskar dari Swedia, selebihnya memang para ahli hukumlah yang menentang hal tersebut.<sup>38</sup>

Perlu pula diperhatikan suatu kenyataan bahwa para criminolisten yang pada mulanya menyetujui pidana mati, akhirnya berpaling menyebrang dan memihak kepada mereka yang menentang pidana mati. Dalam sejarah dapat kita lihat misalnya, Feuerbach adalah sarjana ilmu hukum pidana, yang mula-mula membela pidana mati, akan tetapi setelah mengadakan penelitian lebih lanjut, pada akhirnya berubahlah keyakinan mereka, bahkan mencela pidana mati, malahan sampai terang-terangan menentangnya.<sup>39</sup>

## **2. Pihak-Pihak Yang Pro Pidana Mati**

Sebagaimana yang kontra terhadap eksistensi Pidana Mati mempunyai dasar dan alasan maka yang pro terhadap eksistensi Pidana Mati pun mempunyai dasar dan alasan atas pendapat mereka. Kembali kepada Orientasi di luar hukum Indonesia berikut beberapa pendapat yang menerima bahkan mempertahankan eksistensi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang harus di laksanakan, di antaranya:<sup>40</sup>

### **a. Bichon van Ijsselmonde**

Menyetujui tetap diadakannya Pidana Mati dengan alasan bahwa ancaman dan pelaksanaan Pidana Mati harus tetap ada dalam masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut kepatuhan hukum, maupun ditinjau dari sudut dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure devino et humano*, pedang pemidana seperti juga pedang perang harus tetap ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidaklah

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 148.

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

boleh diserahkan begitu saja akan tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.

**b. De Savornin Lobman**

Juga pro terhadap Pidana Mati dimana beliau mengatakan bahwa di dalam suatu Kitab Undang-Undang tidaklah boleh tidak ada pengakuan terhadap negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan *zedewet* sama sekali, hukum pidana itu tidak lain dari pada hukum balas dendam, bila suatu kejahatan dilakukan maka kejahatan tersebut harus mendapat pembalasan, bila seseorang menginjak-injak *zedewet* sedemikian rupa sehingga dengan perbuatannya itu dia menunjukkan tidak mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkannya dari masyarakat dan pidana mati itu menurut De Savornin Lobman pada prinsipnya sangat sesuai dengan perasaan hukum dari masyarakat.

**c. Mr. Dr. Bombennet**

Mengatakan bahwa adalah tugas negara untuk mempertahankan ketertiban hukum, mempertahankan ketertiban hukum tersebut diwujudkan melalui pidana, jadi penguasa mempunyai hak untuk memidana artinya membalas kejahatan dan hak dari penguasa untuk memidana itu adalah hal yang logis sebagai konsekuensi dari haknya membalas dengan pidana. Selain itu yang menjadi dasar menurut Mr. Nombennet yang menjadi dasar sehingga pidana mati itu dipertahankan adalah ketertiban yang terancam akibat suatu kejahatan hanya dapat dipulihkan kembali apabila penjahat yang mengganggu ketertiban tersebut dilenyapkan dari muka bumi dan satu-satunya cara untuk melenyapkan penjahat tersebut adalah dengan pidana

mati. Karena pidana mati satu-satunya pidana yang dapat menghalanginya dari turut serta dalam kesejahteraan umum itu, maka dari itu negara harus mempunyai hak untuk melaksanakan pidana mati.

#### **d. Lombroso<sup>41</sup>**

Berpendapat bahwa pidana mati itu adalah suatu alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk menyalakan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lombroso sangat merespon terhadap upaya mempertahankan eksistensi pidana mati dimana pidana mati dijadikan upaya radikal dalam rangka meniadakan orang-orang yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dengan demikian hilanglah kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara dan akan menghilangkan ketakutan-ketakutan terhadap orang-orang yang demikian untuk melarikan diri dan melakukan tindak pidana kembali.<sup>42</sup>

Pendapat Lombroso ini dapat kita mengerti jika dihubungkan dengan teori-teorinya yang menyatakan bahwa ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain yaitu mempunyai *praedispositie* untuk kejahatan. Dialah yang mengemukakan pendapat mengenai *Born Criminal*, dan akhirnya Lombroso berpendapat bahwa tidak ada satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki

---

<sup>41</sup>Cesare Lombroso, bernama lahir Ezechia Marco Lombroso (lahir di Verona, 6 November 1835- meninggal di Torino, 19 Oktober 1909 pada umur 73 tahun) adalah seorang kriminolog Italia dan pendiri Mazhab Kriminologi Positivis Italia. Lombroso menolak pendapat Mazhab Klasik, yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sebaliknya, dengan menggunakan konsep-konsep yang diambil dari fisiognomi, eugenika awal, psikiatri, dan Darwinisme Sosial, teori Lombroso mengenai antropologi kriminologi pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah suatu diwariskan, dan bahwa seseorang yang “dilahirkan bersifat kriminal” dapat diidentifikasi dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya, dengan demikian menegaskan bahwa seseorang penjahat adalah seseorang yang biadab, atau memiliki *atavisme* (cacat tubuh bawaan).

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

orang tersebut. Dengan demikian solusi terhadap orang tersebut hanyalah pidana mati karena dengan pidana matilah masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan kriminal orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut.

**e. Prof. Oemar Senoadji, S. H.**

Menyatakan dalam seminar asas Tata Hukum Nasional dalam bidang hukum pidana bahwa, “selama Negara Indonesia masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tertib masyarakat dikacaukan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal prikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan”. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Oemar Senoadji merupakan salah satu pendukung agar eksistensi pidana mati tetap dipertahankan sepanjang masih ada tindak pidana yang tidak mengenal prikemanusiaan.<sup>43</sup>

**f. Drs. Rachmat Djatmiko**

Dalam uraiannya mengenai “Reaksi Pidana Qishas dalam *elastisitet* Hukum Islam” dengan tegas menyatakan bahwa qishas yang didalamnya juga termasuk pidana mati adalah suatu hukum yang perlu ada dalam suatu perundang-undangan untuk masyarakat yang terdapat kedzaliman, dimana para wali tidak dapat mengampuni setelah cukup syarat-syaratnya, maka pidana qishaslah yang lebih tepat dijalankan dan itu adalah hukum yang adil.

**g. B. Bawasyr**

Seorang wartawan Antara ini yang pernah bertugas di Kairo, dalam tulisannya mengenai pro dan kontra pidana mati di Mesir dan Libanon,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

menyatakan: “bahwa pidana seumur hidup adalah lebih kejam, karena penderitaan orang yang dijatuhi pidana ini lebih hebat dari pada penderitaan orang yang dalam sekejap mata saja berpindah ke alam baka, selain itu pidana penjara seumur hidup dianggap tidak cukup menakutkan, sehingga pengaruhnya untuk mencegah kejahatan juga terbatas”.

Dari pendapat B. Bawasyr tersebut dapat kita lihat bahwa pidana mati sangat efektif untuk memberikan aspek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya dalam upaya preventif terhadap orang yang ingin melakukan tindak pidana karena sifatnya yang menakutkan, selain itu juga dapat disimpulkan bahwa kekejaman pidana mati tidaklah melebihi kekejaman pidana penjara bahkan dinyatakan bahwa justru pidana penjara seumur hiduplah yang lebih kejam dan memberikan penderitaan yang lebih hebat dibandingkan pidana mati karena sifat pidana penjara yang memberikan penderitaan secara perlahan.<sup>44</sup>

#### **h. Hartawi A. M.**

Hartawi A. M. Juga menyetujui agar pidana mati tetap dipertahankan dengan alasan:

- 1) Bahwa adanya ancaman dan pelaksanaan pidana mati (*death penalty*) adalah sesuai dengan Pancasila.
- 2) Bahwa pidana mati adalah merupakan *The Right of the Social Defense*, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik, dan psikologis.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

- 3) Bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati perlu ada dalam masyarakat, yang tidak hanya untuk melenyapkan penjahat-penjahat kejam dan berbahaya dalam masyarakat, terutama untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kejam.

Menurut pendapat Prof. Achmad Ali, seorang pakar hukum pidana mengatakan bahwasannya sampai kapanpun pidana mati tetap dibutuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan berat yang secara langsung membahayakan nyawa sesama manusia, seperti pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku “genosida” dan “*crimes against to humanity*” (kejahatan terhadap kemanusiaan), pengedar narkoba, dan teroris. Argumentasi yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati sama sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan, menurut Prof. Achmad Ali sama sekali tidak benar. Contohnya, jika ada 100 orang pengedar narkoba, lalu 50 diantaranya mereka dieksekusi mati, maka sudah barang tentu jumlah pengedar narkoba akan berkurang 50 orang. Pidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini, tapi paling tidak, pidanaan menyebabkan *the sense of justice of the victims* menjadi terwujud. Pidanaan termasuk didalamnya pidana mati dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian (*certainty*).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 36-37.

### C. Pidana Mati Dalam Konsep Hukum Islam

Menurut pandangan islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh dilakukan karena dua faktor, kehendak Allah serta konsekuensi penegakan hukum-Nya berupa eksekusi atas putusan hakim. Atas dasar itu, konsep islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (*jarimah*), karenanya diancam dengan pidana (*uqubah*). Tindakan pidana dalam Islam tersebut dibagi menjadi tiga,<sup>46</sup> yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu dan mutlak (*al-hudud*) yang mencakup kejahatan-kejahatan berat, seperti hubungan seks yang tidak legal (*zina*), menuduh orang berzina (*gazf*), meminum benda-benda yang memabukkan (*syurb alkhomar*), pencurian (*sariqah*), perampokan disertai pembunuhan (*hirabat*), merakayasa huru-hara atau subversi (*albaghyu*), dan murtad dari islam (*riddah*). Kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Karena itu tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya, jika kasus-kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan, hakim tidak berhak mengubah hukuman yang telah ditetapkan.<sup>47</sup> Tetapi jika persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, hakim tidak boleh menerapkan hukuman mutlak. Misalnya, dalam kasus perzinaan harus ada empat

---

<sup>46</sup>Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Tela'ah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 43.

<sup>47</sup>Abdul Karini Aidah, *Al-Madikhal Li Dirasat As-Syari'at Al-Islamiyah* (Mesir, Alexandria: Umar ibn Al-Khattab, 1968), hlm. 463.



saksi yang menyatakannya langsung, jika tidak terpenuhi, hukum *had* tidak dapat diterapkan.

2. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman pembalasan setimpal (*al-qisas*) dan ganti rugi (*ad-diyat*). Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama karena merupakan perpaduan antara hak Allah SWT. dan hak manusia. Contohnya dalam kasus pembunuhan. Hukuman pertama berupa qisas yaitu menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh setelah terbukti bersalah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi jika ahli waris korban memberi maaf, hukuman alternatif untuk terpidana adalah membayar diyat seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi. Inilah yang dimaksud dengan perpaduan antara hak Allah SWT. dan hak manusia.
3. Tindak pidana yang hukumannya diserahkan pada keputusan hakim (*at-ta'zir*). Misalnya, berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal dan merugikan harga diri atau kehormatan orang lain.

Dasar eksistensi hukuman mati dalam agama islam adalah firman Allah SWT yang tertera dalam Al-qur'an, yaitu antara lain:

Surat Al-Baqarah (QS 2: 178-179)

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَبِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah/2: 178).

﴿١٧٩﴾ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَبِ يَتَأُولَىٰ حَيَوةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Terjemahannya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah/2: 179).

Surat Al-Maidah (QS 5: 32):

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

*(membunuh) orang lain<sup>411</sup>, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya<sup>412</sup>. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu<sup>413</sup> sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*"<sup>48</sup>

Dari beberapa kategori hukuman dalam pidana islam, yang terpenting dan paling banyak dibahas oleh para ahli hukum adalah hudud, qisas, dan takzir, karena ketiganya berpotensi menyebabkan kematian. Kejahatan hudud yaitu kejahatan terhadap kepentingan publik, kejahatan ini yang paling serius dalam hukum pidana islam. Hal ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan peribadi sama sekali, terutama berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Beratnya kejahatan qisas berada diantara kejahatan hudud dan takzir. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qisas ini kurang serius dibandingkan dengan yang hudud, namun lebih berat dari takzir. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Kejahatan qisas terdiri dari apa yang dikenal sebagai kejahatan terhadap manusia dalam hukum pidana modern. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau rasa sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana ini.

---

<sup>48</sup>Keterangan: (1) 411 yakni membunuh orang bukan karena qisas; (2) 412 yakni hukuman ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, melainkan juga mengenai manusia seluruhnya. Allah SWT memandang bahwa membunuh seorang manusia itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya; (3) 413 yakni sesudah keterangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Perbincangan yang cukup menarik dalam hukuman ini adalah adanya hukuman mati. Bila dicermati lebih jauh, qisas dalam hal pembunuhan ini tidak hanya dikenal dalam ajaran islam, tetapi juga agama lain. Bangsa barat juga mengakui dan membenarkan qisas. Namun, undang-undang di Barat hanya menjalankan qisas terhadap pembunuhan, tidak terhadap pidana pelukaan.<sup>49</sup> Sedangkan orang Arab pada masa jahiliyah menuntut qisas lebih dari pada yang semestinya. Kadangkala mereka meminta sepuluh orang sebagai ganti seorang yang terbunuh dan meminta orang yang merdeka sebagai ganti budak yang dibunuh. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, terjadilah pertempuran dan pertumpahan darah diantara mereka.<sup>50</sup>

Hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat ketat. Dalam hal pencurian, misalnya, pemotongan tangan adalah hukuman maksimum. Hukuman tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu. Selain hukuman, pelaksanaan qisas juga mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya, bukan orang jahat, bukan pezina, bukan orang murtad, dan bukan orang kafir. Membunuh orang kafir, orang yang murtad, dan pezina tidak dikenakan qisas;
2. Pembunuhnya sudah balig dan berakal;
3. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Artinya, seorang bapak yang membunuh anaknya tidak wajib qisas, sebaliknya seorang anak yang membunuh bapaknya wajib qisas;

---

<sup>49</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT. Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 39-40.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 41

4. Orang yang dibunuh sama derajatnya. Artinya, sama-sama muslim, sama-sama merdeka, sama-sama laki-laki atau perempuan, atau sama-sama budak, (Al-baqarah: 178);
5. Qisas dilakukan pada hal yang sama. Artinya, harus seimbang, jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung, mata dengan mata, kaki dengan kaki, dan seterusnya.

Hukuman dalam islam memiliki landasan yang sangat kokoh, yaitu Al-qur'an dan sunnah Nabi SAW, bukan berdasarkan dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum pun jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamakan sampai kapan pun. Sistem ini juga mengenal pemaafan bagi tindak pidana qisas jika pihak korban atau keluarga korban mau memaafkan, serta memperhatikan aspek pencegahan, pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat, serta perbaikan bagi si pelaku.<sup>51</sup>

Dari kesemuanya itu tujuan yng ingin dicapai dibalik penerapan hukum islam adalah terwujudnya keamanan, ketentraman, sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dari bab ke bab maka penulis menyimpulkan setiap pembahasan agar lebih mudah dipahami, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan fungsi hukum dalam pidana mati secara simbolis menjawab kegusaran moral yang disebabkan kejahatan. Dengan cara ini, hukum menegaskan dan menyusun kembali konsensus moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebagian penerapan hukuman mati setidaknya tetap menjadi suatu usaha pembalasan.
2. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya,

membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crimes*), merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak.

3. Hukuman pidana mati dalam Islam telah ditetapkan oleh syari'at dengan dekret Allah SWT yang sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam itu terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-qur'an diantaranya surat Al-baqarah (ayat 178-179), surat Al-maidah (ayat 32), surat An-an'am (ayat 151), dan Al-isra' (ayat 33).

## **B. Implikasi Penelitian**

Al-hamdulillah penulis berharap dengan selesainya skripsi ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah dapat menjadi salah satu bagian yang turut memberikan sumbangsih pemikiran khususnya terkait dengan persoalan perdebatan eksistensi hukuman di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangsih pemikiran, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman kita khususnya terkait dengan persoalan hukuman pidana mati.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah, serta dapat bernilai ibadah yang menjadi *wasilah* bagi penulis untuk mendapat limpahan kasih sayang-Nya sekaligus Ridha-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, al-karim..,

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.

Arba'i, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). 2012.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1988.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1990.

Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers 2005.

Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indoneisa. 1984.

Efendi, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan tax amnesty dalam penegakan hukum*. Jakarta: Referensi. 2012.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Kesatu. 2011.

Hamzah, Andi. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Hidayatullah, M. Nanang. *Studi Hukum Islam (Kajian Tematik Terhadap Persoalan Kontemporer)*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2008.

Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Digital Library USU (<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>).

<http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum.html>

<http://www.inilah.com/berita/politik/2007/10/30/1739/hukuman-mati-tidak-bertentangan-dengan-uud/>). Diakses pada tanggal 27 September 2013.



<http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/>. Diakses pada 29 April 2013.

Jonkers, J. E. *Hukum Pidana Hindia-Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.

Kansil, C. S. T & Kansil, Christine S. T. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media. 2010.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Permata Press. 2007.

Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2004.

Naning, Ramdlon. *Cita Dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Offset. 1983.

Prasetyo, Tegus. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.

Sahetapy, J. E. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. 2007.

Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru. 1978.

Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2012.



**DAFTAR NILAI**  
**MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA & KETATANEGARAAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nama : Ahmad Syahrin  
 NIM : 10300109002  
 Angkatan : 2009/2010

SEMESTER I					SEMESTER II				SEMESTER III				SEMESTER IV						
NO	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN			
1	Bahasa Arab I	3	3	9	Bahasa Arab II	3	3	9	Pengantar Filsafat Ilmu	2	4	8	Ilmu Falak I	2	3	6			
2	Bahasa Inggris I	3	4	12	Bahasa Inggris II	3	4	12	Bhs Indo/Ped Penulisan KI	2	3	6	Fikih Muamalah	2	3	6			
3	Bhs & Terminologi Hukum	2	4	8	Sosiologi Politik	2	3	6	Sosiologi Hukum	2	3.5	7	Fikih Munakahat	2	3	6			
4	Akidah Akhlak	2	3	6	Hukum Tata Negara	2	4	8	Fikih Siyasah II	2	4	8	Hukum Perdata	2	3	6			
5	Pend Panc & Kewargan	2	3	6	Fikih Siyasah I	2	3	6	Fikih Jinayah II	2	3	6	Hukum Pidana II	2	4	8			
6	Pengantar Ilmu Politik	2	4	8	Fikih Jinayah I	2	4	8	Hukum Pidana I	2	3	6	Administrasi Peradilan	2	3	6			
7	Ilmu Negara	2	4	8	Sejarah Peradaban Islam	2	4	8	Ushul Fikih II	2	4	8	Ekonomi Syari'ah I	2	4	8			
8	Pengantar Ilmu Hukum	2	4	8	Ulumul Hadits	2	4	8	Tarikh Tasyri'	2	4	8	Hukum Kewarisan	2	3.49	6.98			
9	Fikih Ibadah	3	2.5	7.5	Ushul Fikih I	2	4	8	Filsafat Hukum Islam	2	3	6	Peradilan Islam	2	4	8			
10					Metode Studi Islam	2	4	8	Hukum Perwakafan	2	3	6	Hukum Pajak	2	3	6			
11					Ilmu Tafsir	2	3	6											
JUMLAH		21	31.5	72.5	JUMLAH		24	40	87	JUMLAH		20	34.5	69	JUMLAH		20	33.49	66.98
SEMESTER V					SEMESTER VI				SEMESTER VII				SEMESTER VIII						
NO	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN	MATA KULIAH	K	N	KN			
1	Legal Drafting	2	4	8	Politik Hukum	2	4	8	Hkm Ac Konst & Pengujian UU	2	4	8	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	4	16			
2	Kriminologi	2	3	6	Hukum Tata Negara Islam	2	3	6	Tafsir Ayat Pidana & Ketataneg	2	3	6							
3	Hukum Acara Perdata	2	4	8	Kajian UU Pidana & Politik	2	4	8	Hadits Pidana & Ketataneg	2	4	8							
4	Hukum Acara Pidana	2	4	8	Pemikiran Hkm Islam Kont	2	3	6	Praktek Peradilan	1	4	8							
5	Ilmu Falak II	2	3	6	Perb. Hkm Pid Positif & Pid Isl	2	4	8	Praktek Falak	1	4	4							
6	Kepaniteraan & Juru Sita	2	2	4	Hukum dan HAM	2	4	8	Kapita Selektta Hkm Pidana	2	3	6							
7	Ekonomi Syari'ah II	2	4	8	Hukum Konstitusi	2	4	8	Kapita Selektta Hkm Tata Neg	2	4	8							
8	Hukum Administrasi Negara	2	4	8	Hukum Acara PTUN	2	2	4											
9	Hukum Pertanahan	2	3	6	Etika Politik	2	3	6											
10	Hukum Internasional	2	4	8															
11	Met Penelitian Jinayah	2	3	6															
	JUMLAH	22	38	76	JUMLAH		18	31	62	JUMLAH		12	22	40	JUMLAH		4	4	16

$$IPK = \sum \frac{KN}{K} = \frac{493.48}{141} = 3,50$$

Samata, 8 Oktober 2013

Ketua Jurusan,

**Dra. Nila Sastrawati, M.Si.**  
 NIP. 19710712 199703 2 002